

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN

2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Tahun 2025 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban terhadap visi dan misi dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba adalah Mewujudkan peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Industri yang handal dan perdagangan yang sehat dalam rangka mendukung pembangunan di bidang ekonomi. sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Toba.

Dalam pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 14 (empat belas) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp 8.034.436.527 (*Delapan Milyar Tiga Pu/uh Empat Juta Empat Ratus Tiga Pu/uh Enam Ribu Lima Ratus Dua Pu/uh Tujuh*) dengan realisasi Rp 6.982,586.851,00,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Pu/uh Dua Juta Lima Ratus Delapan Pu/uh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Pu/uh Satu Rupiah*) dengan persentase 94,66%, dikategorikan "Berhasil" karena dapat

terlaksana sesuai dengan sasaran dan target program/kegiatan dan sub kegiatan.

Balige, Februari
2025

Kepala Dinas Koperasi
UKM, Perdagangan dan
Perindustrian

10ten Toba


Drs. SALOMO H. K. SIMANJUNTAK
Pembina Utama Muda
NIP. 19680601 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Toba sebagai Instansi Pemerintah, dan Organisasi Perangkat Daerah serta Pengguna Anggaran Tahun 2025, wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, maka dengan kerendahan hati kami menerima masukan/saran untuk perbaikan penyesuaian laporan selanjutnya.

ten
Toba



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

.

KATA PENGANTAR

i

. DAFTAR ISI

i

.

ii

.

i

BAB I PENDAHULUAN

.

1

1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Koperasi UKM

1

1.2 Permasalahan yang dihadapi

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

29

II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

29

II.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja

32

II.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

II.4

35

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Perjanjian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

40

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

40

III.2

Realisasi Anggaran Tahun 2024

84

BAB IV PENUTUP

86

IV.1 Kesimpulan

86

IV.2 Upaya Pemecahan Masalah ke Depan

89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang utama penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Sebelum era reformasi, pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah lebih banyak berfokus pada penyerapan anggaran, bukan pada hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat .

Beberapa poin penting yang menjadi latar belakangnya adalah:

1. **Tuntutan Reformasi dan Good Governance:** Gerakan reformasi 1998 membawa tuntutan kuat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini mendorong perlunya sistem yang dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan kepada publik .
2. **Perubahan Paradigma Penganggaran:** Terjadi pergeseran paradigma dari "anggaran habis terpakai" menjadi "anggaran untuk hasil" (*money follows program*). Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (*outcome*), bukan hanya output (*keluaran*) kegiatannya .
3. **Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan:** Dibutuhkan sebuah sistem yang menyatukan perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar semuanya selaras dan terukur. SAKIP hadir untuk mengintegrasikan ketiganya .
4. **Kewajiban Akuntabilitas Publik:** Instansi pemerintah sebagai lembaga publik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber

daya (APBN/APBD), kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya .

SAKIP dan LKjIP dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja sesuai rencana, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat secara efisien dan efektif.

Hubungan SAKIP dan LKjIP

- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang terdiri dari rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang digunakan untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah . SAKIP adalah keseluruhan proses manajemen kinerja, mulai dari perencanaan (Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja), pengukuran, hingga evaluasi .
- LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah produk akhir dari siklus SAKIP. LKjIP merupakan dokumen yang disusun secara periodik (biasanya tahunan) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD .

Penyusunan SAKIP dan LAKIP didasari oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang kuat, bersifat hierarkis dari tingkat undang-undang hingga aturan teknis. Sebagai informasi tambahan, tonggak awal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia dimulai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Namun, Inpres ini kemudian dicabut dan ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang hingga kini menjadi landasan utama penyelenggaraan sistem tersebut .

Dengan kerangka hukum yang komprehensif ini, SAKIP dan LKjIP tidak hanya menjadi dokumen formalitas tahunan, melainkan bagian tak terpisahkan dari

upaya sistematis pemerintah untuk membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

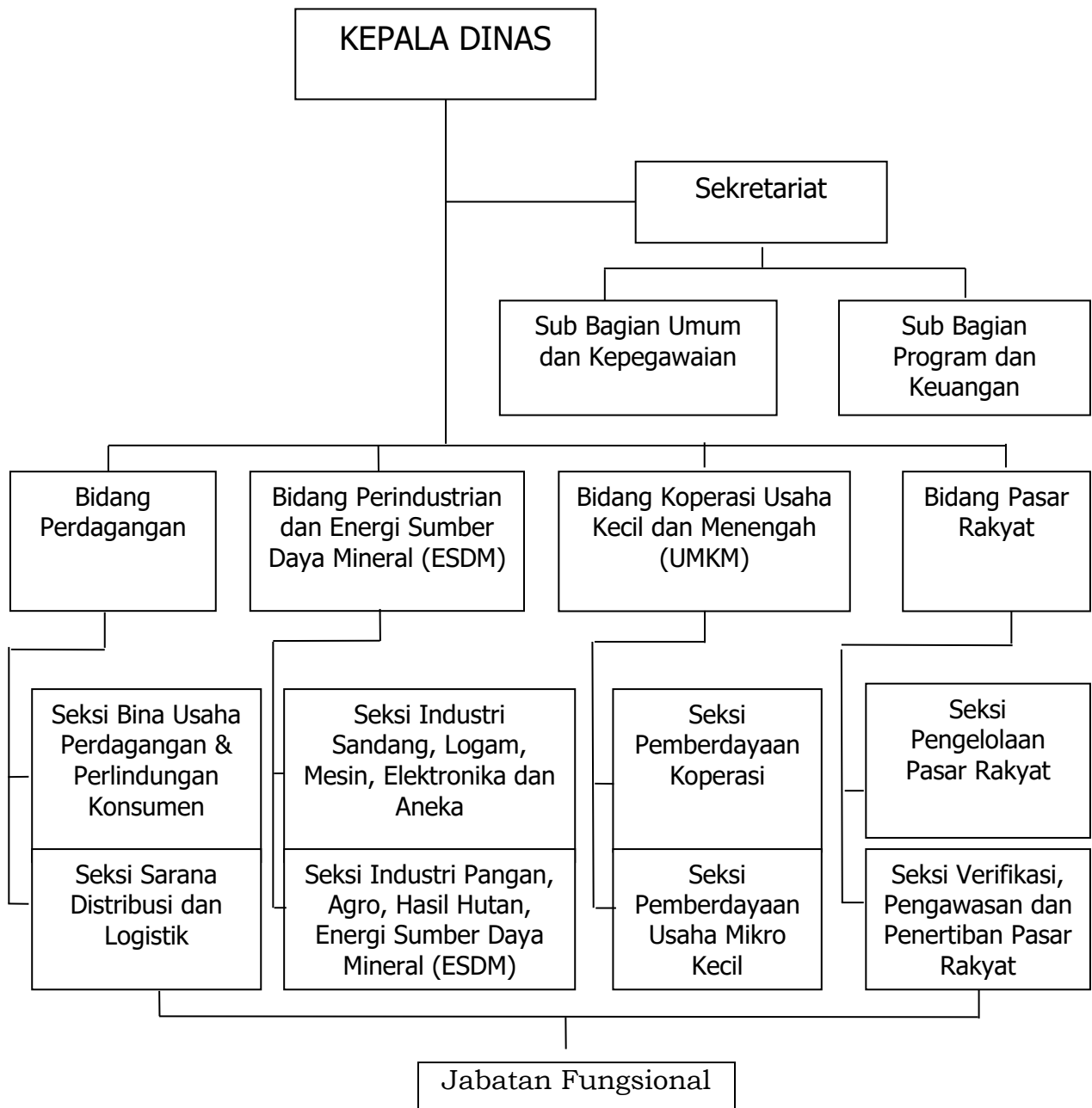
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, sesuai dengan Peraturan Bupati Toba No. 4 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba



Sumber Data : Lampiran XVIII Peraturan Bupati Toba No. 4 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022

1.2.2 Anggaran

Berikut anggaran yang dikelola Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba:

Tabel
Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Sumber	Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)
APBD	2024	8.034.436.527,-
APBD	2025	7.284.042.842,-

Sumber : DPA Dinas Koperin Tahun 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tahun 2025.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan definisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah,

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

Misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Koperin) Pemerintah Kabupaten Toba merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu:

“Pariwisata Berkat dan Meriah “ Misi kelima

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Koperin Kabupaten Toba beserta Indikator Kinerja secara lengkap pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperin Tahun 2025 Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui sektor perindustrian, perdagangan dan koperasi UKM		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,92%	11,03%	11,14%	11,25%	11,48%
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	18,67%	19,05%	19,43%	19,82%	20,21%
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,28%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%
	Meningkatnya pembinaan koperasi/UKM dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pelatihan dan fasilitasi	Persentase koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi	16,81%	13%	6,66%	4,99%	5,33%
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan pengamanan perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	16,67%	20,83%	20,83%	25%	25%
	Meningkatnya pertumbuhan industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	54,55%	57,14%	59,46%	63,16%	65%
	Meningkatnya pembinaan IKM dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pelatihan dan fasilitasi	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	2,87%	2,90%	2,62%	3,59%	2,85%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Cakupan Kinerja				70,20	

Sumber: Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Indikator Kinerja Utama/Sasaran/Kinerja Daerah Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	11,56
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19,43

Sumber Data: SK IKU Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renja Dinas Koperin 2025.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperin Kabupaten Toba

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Indikator	Target 2025
Persentase koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi	Persen	4,99
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	25
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	63,16
Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	Persen	3,59
Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,25%
2.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,43%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,20

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Toba

2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mendukung dalam mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja utama Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang untuk keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

Tabel 2.5

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
Tahun 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	80.000.000,-
<i>Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	80.000.000,-
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.	80.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	60.000.000,-
<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>	60.000.000,-
Penyusunan Basis data usaha mikro	60.000.000,-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	246.000.000,-
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	246.000.000,-
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	246.000.000,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	65.457.450,-
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	65.457.450,-
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	65.457.450,-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000,-
<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	10.000.000,-
Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	458.669.100,-
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	458.669.100,-
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	458.669.100,-
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	145.000.000,-
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	145.000.000,-
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	145.000.000,-
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	90.000.000,-
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000,-
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,-
<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000,-
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000,-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	45.000.000,-
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	45.000.000,-
Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	45.000.000,-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.728.500.000,-
<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1.728.500.000,-
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.728.500.000,-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (RP.)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	170.196.000,-
<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	170.196.000,-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	170.196.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	28.510.000,-
<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	28.510.000,-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINAS	28.510.000,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.759.798.563,-
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	84.240.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.910.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.330.000,-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.163.212.408,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.163.212.408,-
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	377.502.305,-
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.087.240,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.490,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.578.188,-
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	55.071.387,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.765.000,-
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	994.928.250,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	994.928.250,-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>159.915.600,-</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.010.000,-
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	49.905.600,-

Sumber Data: DPA TA 2025 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Koperin) Kabupaten Toba tidak mengalami perubahan substansi. Sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun tetap dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tetap mengacu pada dokumen awal yang telah disepakati, dan seluruh capaian kinerja tetap dipertanggungjawabkan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,25%
2.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,43%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,20

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Toba

2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Untuk mendukung dalam mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja utama Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang untuk keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

Tabel 2.6

**Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
Tahun 2025**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	80.000.000,-
<i>Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	80.000.000,-
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.	80.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	60.000.000,-
<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>	60.000.000,-
Penyusunan Basis data usaha mikro	60.000.000,-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	246.000.000,-
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	246.000.000,-
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	246.000.000,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	65.457.450,-
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	65.457.450,-
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	65.457.450,-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000,-
<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	10.000.000,-
Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	458.669.100,-
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	458.669.100,-
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	458.669.100,-
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	145.000.000,-

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	145.000.000,-
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	145.000.000,-
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	145.000.000,-
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	90.000.000,-
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000,-
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,-
<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000,-
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000,-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	45.000.000,-
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	45.000.000,-
Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	45.000.000,-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.728.500.000,-
<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1.728.500.000,-
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.728.500.000,-
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	170.196.000,-
<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	170.196.000,-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	170.196.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	28.510.000,-
<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	28.510.000,-

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINAS	28.510.000,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.759.798.563,-
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	84.240.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.910.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.330.000,-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.163.212.408,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.163.212.408,-
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	377.502.305,-
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.087.240,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.490,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.578.188,-
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	55.071.387,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.765.000,-
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	994.928.250,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	994.928.250,-
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	159.915.600,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.010.000,-
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	49.905.600,-

Sumber Data: DPPA TA 2025 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari berbagai yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan lainnya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan (pertanggungjawaban atas hasil *result-oriented*) sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintah khususnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran kinerja, tetapi juga menyampaikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara luas dan mendalam.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Dinas Koperin Kabupaten Toba Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja (Tahun Ini, Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir) & Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang telah Dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperin Kabupaten Toba Tahun 2025, yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	11,25	10,74	95,47	95,47
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19,43	20,58	105,92 %	105,92%

Sumber Data : Kabupaten Toba dalam Angka 2026, Volume 28, 2026, BPS

Target kinerja “*Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB*” dengan target 11,25% sedangkan realisasi kinerja 10,74% sehingga persentase pencapaian kinerja 95,47%, dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB} &= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.163.270.000}{10.831.860.000} \times 100\% = 10,74\%
 \end{aligned}$$

Sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman atau produksi produk para pelaku usaha (sektor sekunder, karena produk dan jasa yang ditawarkan sektor ini digunakan atau diproses pada bisnis lain), perhitungan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba pada Tahun 2025.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian target indikator sasaran ini adalah :

- Penentuan target capaian terlalu optimis,
- pelemahan daya beli,
- tekanan pada industri padat karya,
- biaya energi yang tinggi, dan ketidakpastian global telah menekan kinerja sepanjang tahun.

Hal ini membuat peningkatan kontribusi tidak setinggi potensi yang seharusnya, dan beberapa subsektor bahkan mengalami perlambatan pertumbuhan.

Hambatan/Masalah:

- Dinamika intra-year tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan Indonesia mengalami tekanan berat di awal tahun (kontraksi dan PHK),

Strategi/Pemecahan Masalah:

- Pemerintah menjalankan strategi bersifat komprehensif, menggabungkan perlindungan pasar, insentif fiskal yang presisi, jaring pengaman sosial, dan reformasi struktural. Kombinasi ini berhasil mengubah arah sektor industri dari kontraksi di awal tahun menuju lintasan ekspansi dan pemulihan yang solid pada akhir tahun 2025 berhasil melakukan pemulihan bertahap di akhir tahun

yang ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan stimulus kebijakan pemerintah.

Target kinerja “Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB” Tahun 2025 dengan target 19,82% sedangkan realisasi 20,58%, perhitungan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba. Perhitungan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Kontribusi Sektor} \\
 &\text{Perdagangan terhadap} \\
 &\text{PDRB} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.229.690.000}{10.831.860.000} \times 100\% \\
 &= 20,58\%
 \end{aligned}$$

Catatan : ** Hasil perhitungan persentase Kontribusi Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB di atas bersumber dari data “Kabupaten Toba dalam Angka 2026 Volume 28, 2026” BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Toba. (Lampiran 1).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama ini adalah :

- Event Internasional F1H2O sebagai Katalis Ekonomi; Penyelenggaraan F1H2O World Championship di perairan Balige, Danau Toba pada Agustus 2025 menjadi pendorong utama aktivitas perdagangan di Kabupaten Toba.
- Peningkatan Penjualan UMKM: Kehadiran event internasional ini dilaporkan meningkatkan penjualan UMKM lokal hingga 30 persen dibandingkan gelaran dua tahun sebelumnya .

- Dampak *Multiplier Effect*: Para official, pembalap internasional, dan wisatawan yang hadir mendorong transaksi di sektor kuliner, kerajinan tangan, dan produk lokal seperti Kopi Toba .
- Eksposur Global: Event ini tidak hanya meningkatkan penjualan sesaat, tetapi juga memperkuat *branding* Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berdampak jangka panjang pada sektor perdagangan.

Masalah/Hambatan:

- Persaingan usaha tidak sehat, fluktuasi harga pangan, serta hambatan infrastruktur distribusi

Strategi/Pemecahan Masalah :

- Pemerintah telah merespons dengan strategi yang bersifat komprehensif dan berlapis: dari penanganan jangka pendek (penertiban pedagang, pasar murah, fasilitasi petani), revitalisasi infrastruktur fisik (perbaikan jalan dan pasar), hingga kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang (RPJMD 2025-2029 dan KEK Danau Toba). Keberhasilan implementasi strategi ini akan menentukan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Toba secara berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025, yaitu:

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba pada tahun 2025 terhadap analisis pencapaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala untuk tiap-tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pembinaan IKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pelatihan dan Fasilitasi
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pertumbuhan Industri
5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Uraian capaian target Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba pada tahun 2025 (***Lampiran 2***) adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Persentase Koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
“Persentase Koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi”

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Persentase Koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi (%)	4,99	0,65	13,03	Sangat Rendah

Sumber Data : Bidang Koperasi dan UKM

Persentase Koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi pelaksanaan kinerjanya terlaksana dengan baik di tahun 2025 dengan target kinerja 4,99% realisasi kinerja 0,65% (data terlampir) sehingga persentase pencapaian 13,03% dengan uraian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase koperasi/UKM yang dibina dan difasilitasi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\% \\
 &\quad + \frac{\text{Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah UKM seluruhnya}} \times 100\% \\
 &= (0/76 \times 100) + (65/10032 \times 100) \\
 &= 0,65\%
 \end{aligned}$$

Hambatan/masalah:

1. Kurangnya pemahaman koperasi dalam memahami kesehatan koperasi.
2. Sebagian besar koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam belum menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Penugasan dari Pemerintah Pusat untuk pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga Dinas Koperin terpusat kesana.

Upaya mengatasi permasalahan:

- Perlunya pelatihan/pembinaan sumber daya manusia pada dinas yang memiliki kompetensi dalam penilaian kesehatan koperasi.
- Terbatasnya/kurangnya anggaran untuk pelatihan bagi pengurus koperasi.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja “Persentase Koperasi/UMKM yang Dibina dan Difasilitasi” Periode RPJMD Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi (%)	5,33	13	24,60	189,23	6,67	45,52	682,46	4,99	0,65	12,98

2. Sasaran Strategis II : Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal”

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	25,00	0	0	Sangat Rendah

Sumber Data : Bidang Perdagangan

- Indikator Kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal” target kinerja 20,83% dengan realisasi kinerja 0 % tidak dapat terealisasi, disebabkan Dinas Koperasi UKM,

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba tidak ada alokasi dana untuk pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pencapaian kinerja adalah:

1. Dana Tugas Pembantuan tidak ada dari Pemerintah Pusat

Hambatan/masalah:

- Tidak ada anggaran/dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dari pusat.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kembali dengan Pemerintah Pusat, sehingga dana/anggaran dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten Toba.
- Penambahan, Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Petugas Tera
- Penambahan anggaran untuk penyampaian informasi (sosialisai) kepada pelaku usaha/pemilik UTTP pentingnya tera dan tera ulang
- Menciptakan Pasar Tertib Ukur (PTU)

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja “Cakupan Bina Kelompok” Periode 2023-2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%)	20,83	0	0	20,83	0	0	25,00	0	0

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD
“Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan”

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	25	0	0	0	0	0

3. Sasaran Strategis III : Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
“ Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi”

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Persentase IKM yang Dibina dan Difasilitasi	3,59	9,84	274,22	Sangat Baik

Sumber Data : Bidang Perindustrian dan ESDM

- Indikator Kinerja “Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi” dengan target kinerja 3,59%, realisasi kinerja 9,84%, sehingga persentase kinerja 274,22% dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Persentase IKM yang dibina \& difasilitasi} = \frac{\text{Jumlah IKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah IKM seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= (171/1737 \times 100) = 274,22\%$$

Pertumbuhan industri kecil terus bertambah yang terus berlangsung sehingga masyarakat berusaha untuk dapat mempertahankan kehidupan melalui usaha-usaha baru.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tahun 2025.



Pembinaan Industri Kecil Kolang-Kaling
Kecamatan Lumban Julu



Pembinaan Industri Kecil Gerabah di Ds Lintong Nihuta,
Kecamatan Tampahan



Pembinaan Tenun ATBM



Pembinaan Tenun Gedogan Ds. Meat



Pembinaan Industri Kecil Turunan Ulos (Fashion) Kecamatan Sigumpar



Penyerahan Bantuan Benang Sirat kepada Kelompok Tenun



Penyerahan Benang 100 dan Benang SM kepada Kelompok Tenun Ds. Meat

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Ketersediaan dana/anggaran

Hambatan/masalah:

- Terbatasnya modal kerja peserta pelatihan dan pelaku industri kecil dan menengah
- Tidak ada/belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk pembangunan industri
- Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap administrasi keuangan dan standarisasi serta inovasi produk IKM
- mewujudkan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Toba, perlu diatur mengenai arah pengembangan industri yang akan terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

- Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja “Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi” Periode 2023-2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	2,5	10,54	421,6	2,62	13,48	514,62	3,59	9,84	274,22

- Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD “Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi”

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi	10,84	11,63	9,99	10,54	13,48	9,84

4. Sasaran Strategis IV : Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin”

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	63,16	16,67	26,39	Sangat Rendah

Sumber : Data Bidang Perindustrian & ESDM

- Indikator kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin” dengan target kinerja 63,16%, realisasi kinerja 16,67% sehingga persentase pencapaian yaitu 26,67% dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan Bina Kelompok Pengrajin} &= \frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\% \\
 &= 6/36 \times 100\% = 16,67\%
 \end{aligned}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja adalah:

- Pelaksanaan pengendalian izin usaha industri kab/kota ditumpangkan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (kurangnya dana)
- Kurangnya sumber daya manusia aparat.

3. Kurangnya sumber daya manusia dan dana pengrajin.

Hambatan/masalah:

- Dana/anggaran untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota tidak ditampung
- Kurangnya SDM dari pelaku industri untuk mengentri data dan melaporkan perkembangan usahanya, serta mengakses informasi industri yang disediakan oleh

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Pelatihan dan Sosialisasi digitalisasi SIINas perlu dilakukan secara kontinu.

- Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin” Periode 2023-2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,5	10,54	421,6	59,46	25,0	42,05	63,16	16,67	26,39

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin”

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	18,03	11,63	9,99	10,54	25	16,67

5. Sasaran Strategis IV : Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Cakupan Kinerja Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah”

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
1	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	66	66	Sedang

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan IV Dinas Koperin Tahun 2025

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut dengan besaran anggaran dengan target Rp. 5.095.771.764,00 realiasi keuangan Rp. 4.868.237.056,00 dengan persentase 95,53%. Adapun capaian kinerja Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 100 % realisasi kinerja 66%. Maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai indikator sasaran tersebut.

Adapun kegiatan pendukung terhadap indikator kinerja Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah antara lain :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB/70,20	BB/79,50	113,25 %	Sangat Baik

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan besaran anggaran dengan target target Rp. 5.095.771.764,00 realiasi keuangan Rp. 4.868.237.056,00 dengan persentase 95,53%. Adapun capaian kinerja “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” target BB/70,20 dan realisasi kinerja BB/79,50. Maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai indikator sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator ini adalah :

1. Dinas Koperin telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan anggaran antara lain : Renstra, Renja, Rencana Aksi, Pengukuran kinerja, RKA dan DPA.
2. Dinas Koperin telah menyusun LKPJ, LPPD dan laporan kinerja.

Hambatan/Masalah :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya

menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan.

2. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Strategi/Pemecahan Masalah :

1. Memastikan seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan level jabatan, cukup menjawab sasaran strategis, memenuhi kriteria smart dan berorientasi hasil (outcome).
2. Memanfaatkan pelaporan kinerja pada dalam penyesuaian anggaran, strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja berikutnya.

Tercapainya realisasi nilai SAKIP perangkat daerah dari target yang ditentukan di Tahun 2025 dikarenakan perencanaan kinerja sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang telah dicapai. Namun evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilakukan setiap tahunnya dan sepenuhnya digunakan dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP dan perbaikan kinerja secara signifikan ketahun berikutnya.

- Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”
Periode 2023-2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB/70,20	BB/71,26	101,51%	BB/70,20	BB/72,00	102,56%	BB/70,20	BB/79,50	113,25 %

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode
RPJMD “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB/70, 20	-	-	BB/71,26	BB/72,00	BB/79,50

3.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari 6 (enam) sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja, dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.284.042.842,-, realisasi anggaran sebesar Rp 6.543.598.684,- secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)
1	2	4
Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	40.449.000	40.159.900
Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah/Kota		
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	330.594.282	309.764.911
Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.830.000	30.654.500
Program : Pengembangan UMKM		
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		

Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	289.024.860	251.991.301
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5.147.800	2.430.000
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)
1	2	4
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	541.863.312	530.389.740
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Monitoring Pendistribusian LPG 3 Kg dan Makanan yang sudah Kadaluarsa)	12.645.800	11.121.000
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Pemantauan Harga Bahan Pokok)	97.396.550	30.863.600

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)
1	2	4
Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	80.787.300	57.647.400
Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Monitoring Pendistribusian Pupuk Bersubsidi)	43.205.800	29.543.000
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (pelaksanaan tera dan tera ulang)	57.815.530	44.959.920
Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal (Sosialisasi Alat UTTP dan Perlengkapannya)	17.110.800	11.535.000
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	☐	
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	429.752.470	146.791.225

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)
1	2	4
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	724.695.169	585.998.349
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12.690.000	12.269.100
TOTAL (Rp.)	8.034.436.527	6.982.586.851

- Indikator Kinerja “Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha” dengan target 6,63% realisasi kinerja 13,90% sehingga persentase pencapaian 209,59% dengan predikat **Sangat Berhasil**, dengan uraian sebagai berikut :

Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha = $\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Usaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$

$$= (1394/10032 \times 100) = 13,90\%$$

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha” adalah:

1. Program Pengembangan UMKM

Memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 289.024.860,-, realisasi anggaran Rp. 251.991.301,- capaian (87,19%) dengan rincian sebagai berikut:

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta desain dan teknologi dengan target kinerja 12 unit usaha, realisasi kinerja 68 unit usaha yaitu capaian kinerja 566,67%, dan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 289.024.860,-, realisasi anggaran Rp. 251.991.301,- capaian 87,19%.

Realisasi keuangan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 87,19%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 566,67%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan dana/anggaran untuk fasilitasi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha

Hambatan/masalah:

- Pendanaan pelaku UMKM yang kurang

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku UMKM yang membutuhkan fasilitasi untuk pengembangan usaha
Terlepas dari bantuan pemerintah untuk membantu meningkatkan usaha kecil, ada banyak alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan dan cara yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk mendorong usahanya agar lebih berkembang. Salah satunya adalah dengan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan pelaku bisnis dan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha yaitu memilih jenis usaha yang sesuai, melakukan riset pasar, penganggaran modal dengan tepat, memilih lokasi usaha yang tepat, memanfaatkan peralatan yang sudah ada, memanfaatkan social media sebagai sarana dan kanal promosi, inovasi produk yang mengikuti jaman, totalitas dalam bisnis.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat” adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 541.863.312,- realisasi Rp. 530.389.740,- (97,88%)

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 4 unit (400%) dan memiliki pagu anggaran Rp. 541.863.312,- realisasi Rp. 530.389.740,-, dan capaian 97,88%.

Realisasi keuangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 97,88%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja “Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat” sebesar 106,67%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pencapaian kinerja adalah:

1. Dana Tugas Pembantuan tidak ada dari Pemerintah Pusat

Hambatan/masalah:

- Tidak ada anggaran/dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dari pusat.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kembali dengan Pemerintah Pusat, sehingga dana/anggaran dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten Toba.
- Indikator Kinerja “Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)” dengan target kinerja 33,38%, realisasi kinerja 11,76% (data terlampir), persentase pencapaian kinerja 35,24% dengan predikat **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUPToko Swalayan)

$$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

$$= (914/7770 \times 100) = 11,76\%$$

Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan di tahun 2025 sebanyak 914 pelaku usaha, pemohon (pelaku usaha) sudah dapat mengurus izin usahanya secara mandiri melalui Aplikasi OSS (Online Single System) yang terhubung langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin dan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap izin usahanya sudah mulai tinggi.



Gambar : Monitoring Tanda Daftar Gudang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Pelaku usaha yang memperoleh

izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)” adalah:

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Memiliki 1 Kegiatan yaitu Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 5.147.800,- realisasi Rp. 2.430.000,- (47,20%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang target kinerja 100 gudang, realisasi kinerja 1 dokumen (1%), dan memiliki pagu anggaran Rp. 5.147.800,- realisasi Rp. 2.430.000,- , capaian 47,20%.

Realisasi keuangan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar 47,20%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1%, maka terdapat **inefisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Hambatan/masalah:

- Kurangnya pemahaman dan tingkat kepedulian masyarakat/pelaku usaha tentang kepengurusan izin Tanda Daftar Gudang
- Sebagian besar gudang yang digunakan para pelaku usaha adalah disewa.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha berupa Tim Sosialisasi dan Penertiban dengan Bappenda selaku Koordinator Pajak dan Retribusi Daerah, Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang memiliki gudang.
 - Adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang.
- Indikator Kinerja “*Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*” target 96,77% realisasi 2,59% (**Lampiran**), dan persentase pencapaian kinerja 2,68% dengan predikat **Kurang Berhasil**, dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Stabilitas dan} \\
 &\text{Jumlah Ketersediaan} \\
 &\text{Harga Barang} \\
 &\text{Kebutuhan} \\
 &= \frac{\text{Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu}}{\text{Rata - rata Harga Kebutuhan Pokok}} \times 100\% \\
 &= (32478/72333 \times 100) = 44,90\%
 \end{aligned}$$



Gambar : Monitoring Pemantauan Harga di Pasar



Gambar Operasi Pasar

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “*Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*” adalah:

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Memiliki 3 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 146.225.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.846.262,- (55,29%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Monitoring Pendistribusian LPG 3 Kg dan Makanan yang sudah Kadaluarsa), dengan target Kinerja 2 laporan dan realisasi kinerja 2 laporan yaitu capaian kinerja 100% dan memiliki pagu anggaran Rp. 12.645.800,-, realisasi anggaran Rp. 11.121.000,- capaian 87,94%.

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Pemantauan Harga Bahan Pokok), mencakup monitoring harga bahan pokok terhadap 45 komoditi (**Lampiran 8**) dilakukan di Pasar Balige, dengan target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 97.396.550,-, realisasi anggaran Rp. 30.863.600,- dengan capaian 31,69%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak alam 1 (satu) Kabupaten/Kota (**Lampiran**) dilakukan di Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Porsea, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Habinsaran, dengan target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 80.787.300,- realisasi anggaran Rp. 57.647.400,- dengan capaian 71,36%.

c. Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- o Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Monitoring Pendistribusian Pupuk Bersubsidi), dengan target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja

12 laporan yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 20.792.000,-, realisasi Rp. 18.562.400,- dengan capaian 89,28%.

Realisasi keuangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 86,19%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44,90%, maka terdapat **inefisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Hambatan/masalah:

- Kurangnya petugas pendata di Pasar Balige, Pasar Laguboti dan Pasar Porsea,
- Kemampuan sumber daya manusia petugas penginput data aplikasi Siharapanku dan SP2KP harus ditingkatkan/dilatih
- Sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2 (dua) atau 4 (empat) tidak ada dalam pengumpulan data 45 komoditi di Kec Balige, Laguboti dan Porsea

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan petugas pendata
 - Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap petugas pendata dan penginput data aplikasi Siharapanku dan SP2KP diadakan dan dievaluasi secara berkala
 - Terfasilitasinya kendaraan roda 2 petugas pendata untuk pengumpulan data.
- Indikator Kinerja “*Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku*” target 29,15% realisasi 12,07% pencapaian kinerja 41,39% dengan predikat **Kurang**, dengan rincian sebagai berikut :

Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

$$= \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

$$= (414/3431 \times 100) = 12,07\%$$

Kegiatan ini adalah pelaksanaan tera dan tera ulang pada pelaku usaha yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP) agar tercipta tertib ukur dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha |

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku” adalah:

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Memiliki 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 167.962.130,01,-, realisasi anggaran Rp. 50.176.850,- (29,87%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang target kinerja 120 unit, realisasi kinerja 87 Unit, yaitu capaian kinerja 72,50%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 167.962.130,01,-, realisasi anggaran Rp. 50.176.850,- dan capaian 29,87%.

Realisasi keuangan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 29,87%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75,59%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Pelaksanaan tera ulang oleh Petugas Tera dari Bidang Perdagangan terhadap timbangan pelaku usaha secara rutin dan berkala khususnya menjelang hari-hari besar

keagamaan, sehingga tertib ukur dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha

Hambatan/masalah:

- Petugas tera yang ada di Bidang Perdagangan masih sangat kurang dibandingkan dengan potensi tera yang ada di Kabupaten Toba

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan, Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Petugas Tera
- Penambahan anggaran untuk penyampaian informasi (sosialisai) kepada pelaku usaha/pemilik UTP pentingnya tera dan tera ulang
- Menciptakan Pasar Tertib Ukur (PTU)

- Indikator Kinerja “*Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional*” dengan target 7 jenis realisasi 7 jenis sehingga persentase pencapaian 100%, produk lokal yang dapat dipromosikan di tingkat regional dan tingkat Nasional dimana kegiatan ini meliputi promosi produk unggulan daerah yang diikuti Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, yaitu mengikuti pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Event Aquabike.



Gambar : Mengikuti HUT Kabupaten Toba

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah produk lokal yang dapat dipromosikan di tingkat Regional dan tingkat Nasional” adalah:

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 568.500.420,-, realisasi anggaran Rp. 392.592.036,- (69,06%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan target kinerja 7 jenis UMKM, realisasi kinerja 7 jenis UMKM yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 568.500.420,-, realisasi anggaran Rp. 392.592.036,-, capaian 69,06%.

Realisasi keuangan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar 69,06%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang baik
2. Partisipasi dalam pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan F1H20. Adapun produk unggulan daerah yang

dipamerkan adalah produk kerajinan hasil dari tenun, Kacang, kopi, Jagung, Padi dan Sarung (7 jenis).

Hambatan/masalah:

- o Kurangnya pendanaan dalam produksi umkm, tidak adanya mentor dalam kualitas dan inovasi produk UMKM.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk keikutsertaan dan ketersediaan produk dan peserta UMKM
- Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap administrasi keuangan dan standarisasi serta inovasi produk UMKM
- Diharapkan kedepannya kegiatan *event* ataupun pameran untuk promosi produk unggulan daerah Kabupaten Toba semakin banyak mengikuti/berpartisipasi sehingga produk UMKM semakin dikenal di Tingkat Nasional.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 724.695.169,-, realisasi anggaran Rp. 585.998.349,- (80,86%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 4 dokumen yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki anggaran Rp. 724.695.169,-, realisasi anggaran Rp. 585.998.349,-, capaian 80,86%.

Realisasi keuangan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar 80.86%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 129,78%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Ketersediaan dana/anggaran

Hambatan/masalah:

- Terbatasnya modal kerja peserta pelatihan dan pelaku industri kecil dan menengah
- Tidak ada/belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk pembangunan industri
- Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap administrasi keuangan dan standarisasi serta inovasi produk IKM
- mewujudkan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Toba, perlu diatur mengenai arah pengembangan industri yang akan terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Persentase Jumlah Hasil
Pemantauan dan Pengawasan
$$= \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

dengan Jumlah Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil Menengah
yang dikeluarkan oleh

instansi terkait

$$= 60 / 118 \times 100\% = 52,17\%$$

Target kinerja “Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait” yaitu 71,43% sedangkan realisasi kinerja 52,17% sehingga persentase pencapaian kinerja 73,04%, Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait cukup tercapai target kinerja. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk membayar pajak. Instansi terkait yang mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) tersebut adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

1. Pemantauan dan Pengawasan Izin usaha Industri



“Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait” adalah:

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan tidak ditampung.

Realisasi keuangan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar 0%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 73,04%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

4. Pelaksanaan pengendalian izin usaha industri kab/kota ditumpangkan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
5. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk membayar pajak.
6. Kerja keras aparat dinas untuk pengendalian disebabkan termasuk salah satu indikator kinerja perangkat daerah.

Hambatan/masalah:

- Dana/anggaran untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota tidak ditampung

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
- Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini lewat aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan melaksanakan kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, Perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang

terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, serta penyebarluasan data/atau informasi data, yang mana aplikasi yang punya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan dilaporkan per semester sehingga ada 2 dokumen laporan tahunan, dimana perusahaan mendaftar ke Aplikasi SIINas Tahun 2025.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini” adalah:

1. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 14.892.200,-, realisasi Rp. 14.842.400,- (99,67%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 4 dokumen, yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki

anggaran Rp. 14.892.200,-, realisasi anggaran Rp. 14.842.400,-, capaian 99,67%.

Realisasi keuangan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 99,67%, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Dengan menggunakan system digitalisasi SIINas berbasis data, dikarenakan semua data tentang industri maupun kawasan industri dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan disaat pandemik memudahkan melakukan mobilitas dengan menggunakan system digitalisasi ini tanpa harus dengan melakukan pertemuan langsung atau tatap muka.

Hambatan/masalah:

- Kurangnya SDM dari pelaku industri untuk mengentri data dan melaporkan perkembangan usahanya, serta mengakses informasi industri yang disediakan oleh

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Pelatihan dan Sosialisasi digitalisasi SIINas perlu dilakukan secara kontinu.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Target kinerja program tidak semuanya dapat tercapai 100%, antara lain:
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro dan kecil dengan target kinerja 1,80%, realisasi kinerja 0,49%, yaitu capaian kinerja tidak mencapai 100% disebabkan *refocusing* anggaran dan terbatasnya anggaran pendataan UM9KM dan SDM petugas UKM ke lapangan, sehingga data yang diterima hanya yang datang ke kantor.
 - b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan target kinerja 32,68%, realisasi kinerja 14,84%, yaitu capaian kinerja tidak mencapai 100%, disebabkan kurangnya pemahaman dan tingkat kepedulian masyarakat/pelaku usaha tentang kepengurusan izin Tanda Daftar Gudang (TDG), sebagian besar gudang yang digunakan para pelaku usaha adalah disewa, dan tidak semua gudang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2. Adapun Indikator Program yang melebihi/mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara lain :

- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dengan target 12,56% dan realisasi 23,68%.
- b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dengan target 8,97% dan realisasi 50,00%
- c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas dengan target 5,61% dan realisasi 21,05%.
- d) Program Pengembangan UMKM dengan indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha dengan target 6,12% dan realisasi 15,43%.
- e) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator persentase peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat dengan 12,50% dan realisasi 81,25%.
- f) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dengan target 96,78% dan realisasi 97,73%.
- g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator jumlah produk lokal yang dipromosikan di tingkat regional dan tingkat nasional dengan target 6 jenis dan realisasi 6 jenis.
- h) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku dengan target 17,49% dan realisasi 38,48%.

- i) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator pertumbuhan industri dengan target 6,85% dan realisasi 8,89%.
- j) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan target 2 dan realisasi 2.
- k) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator cakupan kinerja urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan realisasi 100%.

Dengan demikian dari seluruh pencapaian indikator kinerja lebih banyak yang tercapai daripada yang tidak tercapai, dapat dikatakan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dikatakan “BERHASIL” sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

IV.2 Upaya Dalam Pemecahan Masalah ke Depan

Demikianlah hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, yaitu:

1. Penambahan pagu anggaran pada setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan, agar menunjang indikator kinerja dapat tercapai dengan baik,
2. Melibatkan seluruh pihak (stakeholder) baik masyarakat dan swasta dalam perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mensinkronkan rencana kerja dengan program pemerintah pusat

dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk mengakomodir program/kegiatan dari Pemerintah Pusat.

4. Mensosialisasikan program/kegiatan dengan perencanaan dan data

yang akurat dan terkoordinir.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang memiliki gudang, serta menerapkan sanksi bagi

pelaku usaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025, semoga bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Toba.

Balige, Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba



Drs. SALOMO H. K. SIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680601 198903 1 004